



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

2025

LAPORAN FEBRUARI

DEPUTI KERAWANAN
PANGAN DAN GIZI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Bulanan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bulan Februari Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan bulanan disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, Laporan Bulanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Laporan Bulanan ini berisi tentang laporan realisasi pencapaian output fisik dan realisasi penyerapan anggaran setiap akhir bulan berjalan dan disusun sebagai laporan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Jakarta, Maret 2025

Pj. Deputi Bidang Kerawanan Pangan
dan Gizi,



Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Metodologi Penyusunan Laporan	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	5
3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan	5
3.2. Monitoring Kegiatan Prioritas	7
BAB IV PENUTUP	15
4.1. Kesimpulan	15
4.2. Permasalahan	15
4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)	15



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Februari sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi Februari)	3
Tabel 2. Realiasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi februari)	5



DAFTARGAMBAR

Gambar 1. Bimbingan Teknis Nasional DPRD Fraksi Demokrat tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota	9
Gambar 2. Konsolidasi Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan dengan Provinsi dan Kab/Kota tahun 2025 secara daring pada Kamis, 27 Februari 2025	12
Gambar 3. Partisipasi pada rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.....	14



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49), Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi; b. Pengendalian Kerawanan Pangan c. Pengadaan dan Pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana d. Pengawasan dan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi e. Pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Februari Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi posisi bulan Januari tahun 2025. Laporan ini merupakan catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Februari Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan



Glzi baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberi informasi tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Direktorat Kewaspadaan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada bulan Februari 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan, berdasarkan target pada bulan Februari 2025

1.3. Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian fisik dan keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.



BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Februari tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi pada bulan Februari tahun 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Januari ditargetkan sebesar 0,07%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Februari sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi Februari)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Februari Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran	Fisik	Keuangan (0,07%)	Fisik
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.981.760.000	1 kegiatan	2.787.232	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4 NSPK	280.000	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	1 rekomendasi kebijakan	1.120.000	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	10.000.000.000	36.000 paket	7.000.000	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	8.400.000.000	28.800 paket	5.880.000	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Februari Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran	Fisik	Keuangan (0,07%)	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	583.200.000	1.944 paket	408.240	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	1 Data	700.000	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	2.352.505.000	1 Kegiatan	1.646.754	0
PAD-Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	169.825.000	1 RPerpres	118.878	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	1.943.429.000	5 rekomendasi kebijakan	1.360.400	1
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	3.111.500.000	1 Data	2.178.050	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	336.930.000	1 Data	235.851	0
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000	5 Unit	346.836	0



BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan terdapat di masing-masing eselon 2 yaitu Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki 5 output/RO dengan pagu anggaran pusat sebesar Rp. 8.409.069.000.- dan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan melaksanakan 5 (lima) KRO yang terdiri dari 6 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp26.323.000.000,- untuk mendukung capaian kinerja kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Realisasi keuangan pada bulan Februari Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi fisik dan keuangan per output seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi februari)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (0,07%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA - Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	2.787.232	1 kegiatan	0	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	280.000	4 NSPK	0	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.120.000	1 rekomendasi kebijakan	0	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	7.000.000	36.000 paket	0	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (0,07%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	5.880.000	28.800 paket	0	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	408.240	1.944 paket	0	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	700.000	1 Data	0	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1.646.754	0	0	0
PAD-Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	118.878	0	0	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	1.360.400	1	0	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	2.178.050	0	0	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	235.851	0	0	0



Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi bulan Februari Tahun 2025 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI mencapai Rp. 0.- atau 0% dari alokasi anggaran selama Tahun 2025 sebesar Rp. 34,732,069,000 Sedangkan jika dibandingkan dengan target bulan Januari Tahun 2025 sebesar Rp. 5.886.768,- realisasi mencapai 0% untuk Direktorat Kewaspadaan Pangan sedangkan untuk Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan 0% dari target Rp. 18.175.472, alokasi anggaran pada lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi masih di bintang atau di blokir Kementerian Keuangan. Pemblokiran tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan organisasi Badan Pangan Nasional khususnya Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang sebagian tugas dan fungsi terkait gizi berpindah ke Badan Gizi Nasional, sementara proses perubahan SOTK masih dalam proses.

3.2. Monitoring Kegiatan Prioritas

Selama bulan Februari 2025, beberapa kegiatan yang telah dilakukan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagai berikut:

3.2.1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan; 2) NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan; 3) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan; 4) Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan(Bantuan Pangan untuk Masyarakat Terdampak Bencana dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan) ; 5) Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi 6) Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan. dengan alokasi anggaran pusat sebesar Rp. 25.964.960.000 (Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan anggaran dekonsentrasi di daerah sebesar Rp1.900.000.000. (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan Februari 2025:



1. Bimbingan Teknis Nasional bagi Anggota DPRD dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan di Indonesia.

Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan tekadnya untuk mendukung tercapainya swasembada pangan. Plt. Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis Nasional DPRD Fraksi Partai Demokrat tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berlangsung di Hotel RedTop, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

"Swasembada pangan merupakan program strategis yang menjadi prioritas utama bagi Presiden Prabowo Subianto, pencapaian swasembada pangan harus didukung oleh semua elemen bangsa, termasuk para kader Partai Demokrat yang memiliki peran penting di legislatif," ujar Sarwo.

"Sebagai negara yang berkomitmen menjadi lumbung pangan dunia, Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Pengalaman dan kapabilitas kita dalam sektor pangan dan pertanian harus dijadikan modal untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut," lanjut Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy juga menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga sebagai pondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kami berharap kader Partai Demokrat, terutama yang memiliki amanah sebagai wakil rakyat, dapat memperkuat upaya ini dengan memberikan dukungan nyata melalui kebijakan yang mengarah pada stabilitas pasokan dan harga pangan," ujarnya.

Melalui berbagai program yang digagas oleh Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy yakin bahwa peran serta kader Partai Demokrat dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan besar ketahanan pangan yang dihadapi bangsa ini. "Kader Demokrat di legislatif harus menjadi bagian dari solusi konkret untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, demi kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.



Lebih lanjut, Sarwo Edhy menekankan pentingnya kompetensi dan pemahaman mendalam terkait isu pangan yang saat ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. "Kader Partai Demokrat harus mampu menguasai substansi kebijakan pangan, serta aktif berperan dalam merumuskan solusi untuk memastikan keberlanjutan pasokan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, NFA terus mendorong para wakil rakyat, termasuk kader Partai Demokrat, untuk bersama-sama merumuskan langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.



Gambar 1. Bimbingan Teknis Nasional DPRD Fraksi Demokrat tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

3.2.2. Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan

Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; 2) RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP); 3) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 4) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 5) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 6) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan. Alokasi anggaran pusat yaitu sebesar Rp. 8.409.069.000,-.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan Februari 2025:



2. Konsolidasi Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan dengan Provinsi dan Kab/Kota tahun 2025.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Sestama NFA, dihadiri oleh Dir 22, Founder Foodbank of Indonesia/FOI sebagai pemrasaran dan dihadiri Kepala Dinas Urusan Pangan 38 Provinsi dan 514 Kab/kota, secara daring mencapai 520 partisipan. Rapat bertujuan: 1) Menggencarkan Upaya Penyelamatan Pangan, termasuk koordinasi dan berbagi praktek baik oleh daerah; dan 2) Mengkoordinasikan persiapan kegiatan Ramadhan Ceria Pangan/RCP 2025.

Dalam arahnya Plt. Sestama NFA menyampaikan urgensi Penyelamatan Pangan, termasuk mandat RPJMN 2025–2029, dengan target persentase penyelamatan pangan 3-5% per tahun. Apresiasi kepada daerah yang sudah menerbitkan instruksi/SE sebagai bentuk komitmen. Semua provinsi dan kab/kota agar terus menggencarkan di wilayahnya masing-masing.

Progres GSP pusat dan daerah dan detail tematik Ramadhan Ceria Pangan/RCP serta kegiatan RCP 2023-2024 sekaligus menghimbau daerah agar pada momentum Ramadhan melakukan sosialisasi dan aksi Stop Boros Pangan dengan seluruh mitra pentahelix. Founder FOI menyampaikan: ruanglingkup peran FOI, kolaborasi dg para donator serta kegiatan di bulan Ramadhan. FOI membuka peluang kerja sama dengan dinas pangan daerah. FOI apresiasi kepada NFA atas inisiasi regulasi, aksi penyelamatan pangan maupun kerja sama pentahelix. Secara khusus juga apresiasi OPD Pangan Jawa Barat, Kota Bogor dan Kota Semarang atas dukungan penyaluran pangan berlebih bersama FOI dan Dinas PKP DIY untuk dukungan gudang penyimpanan dan unit penyaluran pangan berlebih.

Pada sesi diskusi terdapat beberapa praktik baik yang telah dilakukan daerah:

- 1) Dinas Pangan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan (DPTHP) Papua akan berkolaborasi dengan Bank Pangan Cendrawasih dalam mendukung upaya antisipasi pemborosan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan sosialisasi Sekolah Berbasis Pangan (SBP) kepada siswa Sekolah Dasar melalui kolaborasi dengan media televisi dan podcast. Pada tahun ini, DKPP Prov. Sumsel juga akan menjalin



Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk dalam rangka persiapan pelaksanaan Rencana Cadangan Pangan (RCP)

- 3) Penjabat Gubernur Papua Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait program "Bijak Belanja Pangan" menjelang bulan Ramadhan bersama para pemangku kepentingan, yaitu Bank Indonesia, BUMN, Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi serta pencegahan pemborosan pangan.
- 4) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Papua Barat telah melaksanakan sosialisasi program *Stop Boros Pangan* kepada seluruh Tim Penggerak PKK kabupaten/kota hingga ke tingkat dasa wisma, serta kepada peserta didik, termasuk melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- 5) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo telah menginisiasi upaya penyelamatan pangan serta memfasilitasi penyediaan tempat penyimpanan dan kendaraan pendukung untuk kegiatan tersebut. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa telah terbentuk Bank Pangan baru di Kota Salatiga dan Kota Pekalongan. Adapun Rencana Cadangan Pangan (RCP) Tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan di Kota Semarang dan Kota Salatiga.
- 6) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bogor telah menerbitkan Surat Edaran Walikota tentang program *Stop Boros Pangan* serta mengembangkan aplikasi "NGUPAHAN" yang bertujuan untuk mengidentifikasi mitra dari sektor perhotelan. Selain itu, DKPP juga telah melaksanakan rapat koordinasi Gerakan Stop Pangan (GSP) bersama pelaku usaha perhotelan, ritel, dan restoran, serta sedang menjalin kerja sama dengan Foodbank of Indonesia (FOI).
- 7) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor saat ini sedang menyusun Instruksi Walikota terkait upaya penyelamatan pangan. Kegiatan Gerakan Stop Pangan (GSP) telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG).



Sosialisasi juga telah dilakukan di sekolah-sekolah melalui kerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI).



Gambar 2. Konsolidasi Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan dengan Provinsi dan Kab/Kota tahun 2025 secara daring pada Kamis, 27 Februari 2025

3. Partisipasi pada rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri

Memastikan harga dan pasokan komoditas pangan strategis menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus melaksanakan sejumlah program aksi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan NFA Nita Yulianis saat Rapat Koordinasi Inflasi Daerah yang rutin dilaksanakan setiap minggu di Kementerian Dalam Negeri, Senin (17/2/2025).

“Berdasarkan prognosa, neraca pangan diproyeksikan aman terutama menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, harga sejumlah komoditas pangan strategis secara nasional terus dipantau melalui Panel Harga Pangan,” jelas Nita. Komoditas beras tahun 2025 diproyeksikan surplus 9 juta ton, gula konsumsi 1,1



juta ton, daging ruminansia 42 ribu ton, dan cabai rawit 33 ribu ton serta telur ayam ras 284 ribu ton.

Menurut Direktur Kewaspadaan Pangan mewakili Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, GPM yang merupakan salah satu instrumen untuk stabilisasi pasokan dan harga terus dimasifkan pelaksanaannya. “Hingga 14 Februari 2025 ini, secara total telah dilaksanakan sebanyak 376 kali di 9 Provinsi dan 47 kab/kota di seluruh Indonesia melalui APBN, APBD maupun mandiri” tuturnya.

Strategi intervensi lainnya dilaksanakan dengan memaksimalkan kerja sama antar daerah dalam bentuk program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan memperbanyak penyebaran Kios Pangan sebagai alternatif masyarakat dalam mengakses pangan pokok strategis yang berkualitas dengan harga terjangkau juga terus digalakkan bersama pemerintah daerah. “Hingga saat ini, terdapat 453 kios pangan di 31 provinsi dan 103 kabupaten/kota yang menyediakan bahan pangan pokok setiap hari dengan harga terjangkau,” kata Nita.

Untuk menyukseskan upaya mengamankan pasokan dan harga pangan pada momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri diperlukan peran aktif seluruh pemerintah daerah. “Bapak Kepala Badan Pangan Nasional telah menyampaikan imbauan ke seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati seluruh Indonesia untuk dapat mendukung strategi pengamanan pasokan dan harga pangan jelang HBKN. Ini merupakan tindak lanjut dari Rakor SPHP beberapa waktu yang lalu (Rabu, 12/2/2025),” sebut Nita. Hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga, terkecuali harga gabah kering panen di tingkat petani.

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan kecenderungan inflasi meningkat di awal bulan Ramadan, dan cenderung menurun pada momentum Idulfitri. Diharapkan seluruh pihak dapat bahu-membahu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta dalam upaya mengendalikan inflasi pangan. “Kenaikan harga yang perlu diwaspadai menjelang Ramadhan dan Idul Fitri diantaranya daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras dan emas perhiasan,” ungkap Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Pudji Ismartini.



Gambar 3. Partisipasi pada rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan bulan Januari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 1(satu) kegiatan terdiri dari 5 KRO dan 6 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.964.960.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. Terdapat 6 output yaitu: 1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; 2) RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP); 3) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 4) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 5) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 6) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan. Alokasi anggaran pusat yaitu sebesar Rp. 8.409.069.000,-.
3. Realisasi Keuangan dan Fisik dari masing-masing Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan masih 0% karena anggaran masih diblokir dan kegiatan masih dalam tahap persiapan.

4.2. Permasalahan

Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan selama Bulan Februari 2025 belum dapat berjalan karena seluruh anggaran masih dalam proses buka blokir.

4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)

Perlu menyusun rencana kegiatan dan rencana penyerapan anggaran untuk mempercepat realisasi keuangan dan fisik pada bulan berikutnya ketika anggaran sudah dibuka blokir.